

Analisis Penetapan Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Daerah Di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Asahan

Dang Panagaman Tamba^{1*}, Faulia Anggeraini², Hajar Affiah³

¹⁻³STIE Muhammadiyah Asahan, Indonesia

Article Info: Accepted: 6 Februari 2024; Approve: 11 Februari 2024; Published: 18 Februari 2024

Abstrak: Perhitungan penetapan pendapatan asli daerah dan belanja daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian anggaran dengan realisasi belanja yang dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Serta tetap mempertahankan tingkat efisiensi dan efektivitasnya dimana setiap tahun mengalami perubahan yang sangat baik dan tingkat efisien tiap tahunnya masuk dalam kriteria yang sangat efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan, sedangkan analisis data dengan teknik pengukuran rasio dengan menggunakan rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan tingkat efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan mengalami kenaikan target dan realisasi yang terjadi. Tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 14%, tahun 2018 naik menjadi 15% kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 26%. Begitupun pada tingkat efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah mengalami peningkatan dengan tingkat kriteria yang efektif. Pada efisiensi belanja daerah tahun 2017 sebesar 45,51%, tahun 2018 sebesar 56,53%, dan tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 57,70% sehingga anggaran belanja di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sudah memiliki kriteria yang sangat efisien.

Kata Kunci: Analisis; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Daerah.

Abstract: The calculation of the determination of local revenue and regional expenditure is intended to assess the suitability of the budget with the realisation of expenditure carried out at the Asahan Regency Agriculture Office. As well as maintaining the level of efficiency and effectiveness where each year experiences very good changes and the level of efficiency each year is included in the very efficient criteria. The purpose of this study was to determine the determination of local revenue on regional expenditure at the Asahan Regency Agriculture Office. Researchers used a qualitative descriptive analysis method. Data collection techniques using observation, documentation and literature study, while data analysis with ratio measurement techniques using growth ratios, effectiveness ratios and efficiency levels. The results showed that the management of the growth rate of local revenue at the Asahan Regency Agriculture Office experienced an increase in the target and realisation that occurred. In 2017 experienced a growth of 14%, in 2018 it rose to 15% then in 2019 experienced a significant increase to 26%. Likewise, the level of effectiveness of local revenue and regional expenditure has increased with an effective level of criteria. In 2017 the efficiency of regional expenditure was 45.51%, in 2018 it was 56.53%, and in 2019 the efficiency level was 57.70% so that the expenditure budget at the Asahan Regency Agriculture Office already had very efficient criteria.

Keywords: Analysis; Local Revenue; Local Expenditure.

Correspondence Author: Dang Panagaman Tamba

Email: nagamsaragi800@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara pertanian, dalam hal ini pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional (Fatmawati et al., 2023; Rodiaminollah, 2023; Batubara & Pane, 2023; Andira & Febrian, 2023). Hal ini dapat dibuktikan dengan

penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian. Sejak awal proses pembangunan di Indonesia telah difokuskan pada aktivitas ekonomi yang banyak dari sektor pertanian, yang sekarang dikenal dengan strategi industrilisasi. Dalam hal ini sektor pertanian merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pertanian dengan industri dan jasa. Pembangunan dalam ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani dan meningkatkan kualitas kehidupan melalui peningkatan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi, serta keperluan ekspor.

Dinas Pertanian Kabupaten Asahan merupakan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan kemampuan berkefektifitas dalam upaya pengendalian, pencegahan, pemberantasan, pengobatan, penyakit tumbuhan menular (Siregar, 2022). Dalam hal ini, Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan masih terdapat kekurangannya dalam hal realisasi anggaran belanja dan pendapatan daerah, yaitu dalam hal pengalokasian, penyaluran dan peningkatan dalam penetapan pendapatan daerah. Maka dari itu analisis diperlukan untuk melihat kekurangan yang terjadi dalam setiap penetapan di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Asahan terhadap pembangunan sektor pertanian perlu di tingkatkan, karena pada kenyataannya sektor pertanian mempunyai peran penting yang cukup besar sebagai salah satu penyumbangan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan lain-lain dari hasil usaha daerah yang besar dan penerimaan dari negara lain yang sah.

Target pendapatan Dinas Pertanian Kab. Asahan di tahun 2019 mencapai Rp498 Juta Rupiah dibanding target tahun 2018. Target pendapatan Dinas Pertanian Kab. Asahan pada tahun 2018 mencapai Rp402 Juta, Jumlah tersebut meningkat dari target pendapatan tahun 2017 yakni Rp359 Juta. Dari Rp359 Juta, realisasi pendapatan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan pada tahun 2019, sebanyak Rp337 Juta. Persentase pembelanjaan ini meningkat dari tahun 2018 dan 2017 seiring dengan bertambahnya pendapatan yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian proses penetapan pendapatan asli daerah dalam belanja daerah pada Dinas Pertanian.

Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ramadhan, 2019; Asteria, 2015). Pendapatan Asli Daerah merupakan

pendapatan daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yasin, 2020; Devita et al., 2014). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya.

2. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Klasifikasi pendapatan asli daerah dalam hal ini terbagi menjadi (1) pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. (2) Retribusi daerah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain penerimaan yang sah (Wulandari & Iryanie, 2018).

3. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Suhaedi, 2019; Asih, 2018; Fatimah et al., 2019). Belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merujuk pada eksplorasi fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek seperti individu, organisasional, industri, atau perspektif lain. Penelitian deskriptif pada intinya bertujuan untuk memahami variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen), tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain (Soendari, 2012; Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian fokus pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik variabel yang dipilih, tanpa adanya usaha untuk membuat perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lain yang mungkin mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel utama, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti untuk menciptakan dampak pada variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebas yang menjadi fokus adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, variabel terikat adalah variabel respon atau output dari manipulasi variabel bebas. Dalam konteks penelitian ini, variabel terikat adalah belanja daerah, yang mencakup semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagai variabel respon, belanja daerah akan muncul sebagai hasil dari manipulasi variabel bebas, yakni Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ini, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam terhadap pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kebijakan belanja daerah.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio untuk mengukur kinerja pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian meliputi Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektifitas, dan Perhitungan Tingkat Efisiensi.

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Adapun persamaan untuk mengukur rasio pertumbuhan yaitu sebagai berikut.

$$RPPAD = \frac{RealisasiPADt - RPPADt - 1}{RPPADt - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

RPPADt = Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PADt= Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Berjalan

RPPADt-1 = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Sebelumnya

Setelah dilakukan analisis rasio pertumbuhan, lalu hasilnya dikonsultasikan pada table 1 di bawah untuk melihat tingkat pertumbuhan yang telah diperoleh.

Tabel 1. Kreteria Tingkat Pertumbuhan

Presentase	Kreteria
0-10%	Sangat Kurang
11%-20%	Kurang
21%-30%	Sedang
31%-40%	Cukup Sedang
41%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 (dalam Handoko:2015)

2. Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun persamaan yang digunakan untuk mengukur rasio efektifitas yaitu sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan analisis rasio efektifitas, lalu hasilnya dikonsultasikan pada table 2 di bawah untuk melihat tingkat efektifitas yang telah diperoleh.

Tabel 2. Kriteria Efektifitas

Presentase	Kreteria
< 60%	Tidak Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
90%-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2004 (dalam Dwindra:2015)

3. Perhitungan Tingkat Efisiensi

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Maka digunakan persamaan sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan Perhitungan Tingkat Efisiensi, lalu hasilnya dikonsultasikan pada table 3 di bawah untuk melihat tingkat Efisiensi yang telah diperoleh.

Tabel 3. Kreteria Efisiensi

Presentase	Kreteria
< 60%	Sangat Efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2004 (dalam Dwindra:2015)

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Kabupaten. Dinas Pertanian Kabupaten Asahan diresmikan pada tahun 1970-an oleh Kepala Derah Tingkat II Kabupaten Asahan. Berikut disajikan data target dan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja daerah Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	359.292.471	337.182.371
2018	402.750.115	390.675.105
2019	498.818.751	492.720.705

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Asahan

Adapun Realisasi Anggaran belanja di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2017-2019

Tahun	Target Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)
2017	57.884.267.003	54.288.263.099
2018	60.778.094.857	57.502.710.070
2019	64.023.195.600	60.840.590.000

Sedangkan realisasi anggaran belanja langsung dan total realisasi anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Total Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi BelanjaLangsung (Rp)	Realisasi Belanja(Rp)
2017	24.707.145.574	54.288.263.099
2018	32.509.510.778	57.502.710.070
2019	35.110.060.240	60.840.590.000

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Asahan

Selanjutnya hasil dari analisis Rasio Pertumbuhan di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 7. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Kreteria
2017	359.292.471	337.182.371	14%	Kurang
2018	402.750.115	390.675.105	15%	Kurang
2019	498.818.751	492.720.705	26%	Sedang

Sumber: Laporan PAD Dinas Pertanian Kabupaten Asahan (Data olahan)

Dari tabel di atas dapat dilihat selama periode 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Di tahun 2017 taget pendapatan asli daerah sekitar Rp359.292.471,- dengan realisasi sebesar Rp337.182.371 dan mengalami pertumbuhan 14%. Sedangkan tahun 2018 target pendapatan asli daerah sekitar Rp402.750.115 dan terealisasi Rp390.675.105,- dan pertumbuhannya sekitar 15%. Ditahun 2019 mengalami kenaikan target sekitar Rp498.818.751,- dan terealisasi sebanyak Rp492.720.705, mengalami pertumbuhan sekitar 26%. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan yang terjadi di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, pihak terkait dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pertumbuhan di tahun berikutnya dan menjadi pedoman untuk perencanaan yang akan datang.

Sementara hasil dari analisis Rasio Efektivitas, yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 8. Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kreteria
2017	359.292.471	337.182.371	93%	Efektif
2018	402.750.115	390.675.105	97%	Efektif
2019	498.818.751	492.720.705	98%	Efektif

Sumber: Laporan Target PAD Dinas Pertanian Kabupaten Asahan (Data olahan)

Dapat dilihat dari tabel di atas, tingkat efektivitas pada tahun 2017 sekitar 93% dari target Rp359.292.471,- dan terealisasi sebanyak Rp337.182.371 ini menunjukkan efektifnya realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan pada tahun 2017. Sedangkan 2018 dan 2019 sekitar 97%-98% tingkat efektivitas, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan menunjukkan efektifnya realisasi yang terjadi. Dalam hal ini tingkat efektifitas di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan yang signifikan.

Lebih lanjut, hasil dari analisis tingkat efektivitas, seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kreteria
2017	57.884.267.003	54.288.263.099	93,78%	Efektif
2018	60.778.094.857	57.502.710.070	94,61%	Efektif
2019	64.023.195.600	60.840.590.000	94,98%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Asahan (Data Olahan)

Dari tabel diatas dapat dilihat selama periode anggaran tahun 2017–2019, tingkat efektivitas anggaran belanja tidak tetap dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya yaitu 93,78% pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya yaitu 94,61% dikatakan efektif, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu menjadi 94,98% masih tetap efektif. Jadi secara keseluruhan dari tahun 2017–2019, tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan mengalami peningkatan yang efektif. Sedangkan hasil analisis Tingkat Efisiensi yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut ini.

Tabel 10. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja(Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kreteria
2017	24.707.145.574	54.288.263.099	45,51%	Sangat Efisien
2018	32.509.510.778	57.502.710.070	56,53%	Sangat Efisien
2019	35.110.060.240	60.840.590.000	57,70%	Sangat Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Asahan (Data Olahan).

Tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi dari anggaran belanja yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan yang tidak tetap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi yang didapat sebesar 45,51% dan pada tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 56,53%. Dari sudut pandang tingkat efisiensi ini dipandang sebagai peningkatan tingkat efisiensi dan termasuk dalam kriteria sangat efisien karena dibawah 60%. Pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan tingkat efisien sebesar 57,70% dan masuk dalam kriteria sangat efisien karena dibawah 60%. Kedepannya pemerintah daerah atau terlebih khusus Dinas Pertanian Kabupaten Asahan agar dapat mempertahankan tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran dengan meningkatkan terus pengawasan, pelayanan, dan koordinasi pemerintah agar supaya realisasi pendapatan asli daerah lebih maksimal.

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Dinas Pertanian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)		Belanja Daerah (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	359.292.471	337.182.371	57.884.267.003	54.288.263.099
2018	402.750.115	390.675.105	60.778.094.857	57.502.710.070
2019	498.818.751	492.720.705	64.023.195.600	60.840.590.000

Pelaksanaan anggaran belanja digunakan untuk berbagai aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Pembebanan biayaan berperan dalam mengukur berbagai sumberdaya yang dipakai dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Dengan adanya perhitungan biaya maka Dinas Pertanian dapat melakukan pengeluaran atau pembelanjaan yang telah direncanakan oleh pejabat yang berwenang selaku pengguna anggaran belanja sehingga realisasi belanja dapat tercapai.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa peran Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang secara hierarki bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Kabupaten. Dinas ini telah menjadi bagian integral dalam struktur pemerintahan setempat sejak diresmikan pada tahun 1970-an oleh Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan.

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta belanja daerah Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dari tahun 2017 hingga 2019. Pada sisi pendapatan, terlihat adanya kenaikan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 26%. Analisis rasio pertumbuhan juga menggambarkan bahwa pertumbuhan pendapatan pada tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai sedang.

Selanjutnya, hasil analisis rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Asahan berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah. Dengan tingkat efektivitas yang stabil dan meningkat dari tahun ke tahun, pihak terkait dapat menggunakannya sebagai acuan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang.

Pada aspek belanja, hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik, di bawah 60%, sepanjang periode tahun 2017 hingga 2019. Ini mengindikasikan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dapat mencapai target belanja dengan menggunakan sumber daya yang optimal. Penekanan pada pengawasan, pelayanan, dan koordinasi pemerintah dapat menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat efisiensi ini.

Analisis realisasi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah menunjukkan keseimbangan yang baik, dengan realisasi pendapatan yang secara konsisten mencapai persentase yang tinggi terhadap target belanja. Hasil ini memberikan gambaran positif tentang pengelolaan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, yang dapat dijadikan dasar untuk perencanaan anggaran di masa depan.

Sebagai kesimpulan, melalui analisis rasio pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, temuan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Data dan hasil analisis tersebut dapat menjadi landasan untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan transparansi keuangan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di bidang pertanian di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Pengelolaan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Asahan menunjukkan tren peningkatan baik dari segi target maupun realisasi. Pemerintah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, berhasil mencapai pencapaian yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga 2019. Meskipun dalam kriteria tingkat pertumbuhan masih tergolong kurang, namun terdapat peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, mencerminkan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah.

Pengelolaan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan terbukti cukup efektif. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas mencapai 91%, dengan realisasi mencapai Rp337.182.371 dari target Rp359.292.471. Namun, terjadi peningkatan yang positif pada tahun 2018 dan 2019, dengan tingkat efektivitas mencapai 97%-98%, menunjukkan kinerja yang semakin optimal dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dapat dikategorikan sebagai sangat efisien, karena tingkat efisiensi yang terjaga dengan baik. Peningkatan tingkat efektivitas dan efisiensi ini dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat memberikan dorongan untuk melanjutkan upaya perbaikan dan perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Referensi

- Andira, A., & Febrian, A. (2023). Strategi Pengembangan Perekonomian Masyarakat Pasca Gempa Di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(1), 01–09.
- Asih, S. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 177–191.

- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61.
- Batubara, M., & Pane, M. M. (2023). Pengaruh Pertanian terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 74–81.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Equity*, 22(2), 197–214.
- Fatmawati, A., Mulyanti, D. R., Hasmidar, H., Nasution, A. H., & Muala, B. (2023). *EKONOMI PERTANIAN: Pengantar dan Konsep Dasar Ekonomi Pertanian di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Rodiaminollah, M. (2023). Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi. *IQTISODINA*, 6(1), 49–55.
- Siregar, H. S. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Iklim Organisasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11385–11393.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17.
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.